SADHARANANIKARANA:
Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

KONSTRUKSI AGENDA KARHUTLA DI MEDIA MASSA: REFLEKSI KEHARMONISAN RELASIONAL DALAM BINGKAI *TRI HITA KARANA*

Oleh :
Nengah Yudik Artana[1]
Universitas Widyatama[1]
Email: yudik.artana83@gmail.com[1]

Abstract

This study examines environmental communication through the lens of agenda-setting theory, critically evaluating how online mass media constructs the discourse on forest and land fires (karhutla) in Indonesia. Grounded in the Hindu philosophical framework of Tri Hita Karana, this research aims to analyze the representation of ecological harmony (Palemahan), social justice (Pawongan), and ethical-spiritual accountability (Parahyangan) within news coverage. A qualitative descriptive approach using critical discourse analysis was applied to examine purposively selected news articles from major national media outlets during peak fire periods. The findings reveal a dominant episodic framing that overemphasizes political bureaucratic polemics and economic losses, while marginalizing indigenous vulnerability (Pawongan) and the systemic ecological degradation of peatlands (Palemahan). Furthermore, the Parahyangan dimension remains virtually invisible, as media coverage rarely frames ecocide as an ethical and spiritual transgression against cosmic balance. This paper contributes to the decolonization of communication studies by integrating indigenous philosophical values into environmental journalism analysis. In conclusion, the medias agenda fails to reflect holistic relational harmony, highlighting an urgent need to shift toward ecologically conscious, value-driven journalism that fosters genuine ecological literacy and accountability.

Keywords: Agenda-Setting, Environmental Communication, Karhutla, Tri Hita Karana.

I. Pendahuluan

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah lama bertransformasi dari sekadar siklus musiman dampak anomali iklim menjadi krisis ekologis-struktural yang mencerminkan rapuhnya tata kelola hubungan antara manusia dan alam. Fenomena pelepasan kabut asap pekat (*haze*) yang berulang setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan publik secara multidimensional. Data observasi dan pemantauan Sistem Informasi Deteksi *Hotspot* Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa akumulasi titik panas (*hotspot*) dengan tingkat kepercayaan

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

tinggi secara konsisten melonjak tajam pada periode kemarau ekstrem, melahap ratusan ribu hektare bentang alam gambut yang memiliki peran vital sebagai penyerap karbon global. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah kota sentral di Kalimantan dan Sumatera kerap menembus level berbahaya (>300 µg/m³), yang secara langsung memicu lonjakan masif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), merenggut hak hidup sehat masyarakat lokal, serta mematikan rantai pasok ekonomi dan logistik daerah terdampak. Bencana ini bukan sekadar insiden biologis-meteorologis murni, melainkan cerminan nyata dari defisit etika dan desakralisasi perlakuan manusia terhadap ruang hidup biosfer.

Dalam pandangan masyarakat, realitas bencana karhutla tidak hadir secara murni di benak publik, melainkan melalui proses konstruksi simbolik dan penyaringan makna yang dilakukan oleh industri pers. Media massa daring memainkan fungsi sentral sebagai pembentuk realitas sosial (*social construction of reality*) melalui mekanisme penentuan agenda (*agenda-setting*). Sebagaimana ditegaskan dalam epistemologi komunikasi massa, apa yang dianggap genting dan penting oleh khalayak merupakan representasi dari apa yang secara berulang diutamakan, dibingkai, serta ditonjolkan oleh media dalam ruang redaksinya. Namun demikian, peliputan bencana lingkungan di Indonesia sering kali terjebak dalam perangkap jurnalisme peristiwa (*episodic framing*) yang reduksionis. Media massa lebih memprioritaskan atribusi sensasional, seperti tebalnya kabut asap yang menghalangi jarak pandang penerbangan, kerugian kalkulatif ekonomi makro, atau seremoni politis para pejabat yang melakukan peninjauan lapangan dengan pakaian dinas, ketimbang mengurai akar penyebab krisis berupa perusakan ekosistem yang terstruktur dan ketidakadilan ekologis yang menimpa masyarakat adat di garis depan krisis.

Kesenjangan wacana publik ini tercermin secara nyata dalam studi-studi mutakhir bidang komunikasi lingkungan selama rentang waktu lima tahun terakhir di Indonesia. Melalui pemetaan literatur dari periode teranyar, Pratama dan Wijaya (2025) menemukan bahwa penetapan agenda media massa daring terhadap kebakaran gambut masih sangat didominasi oleh suara elite teknokratik dan kalkulasi kerugian devisa negara, sementara aspek penderitaan jangka panjang masyarakat marjinal dan degradasi

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

habitat satwa endemik tersisih ke pinggiran teks berita. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Mahendra (2025) mengungkap bahwa media arus utama cenderung mengabaikan aspek keadilan restoratif lingkungan dalam pemberitaan sanksi korporasi pembakar hutan. Hal ini diperkuat oleh Hidayat et al. (2024) dalam risetnya mengenai representasi krisis iklim di portal berita daring nasional yang menyoroti minimnya atribusi kausalitas moral dan sistemik; media membingkai karhutla sebagai takdir alamiah perubahan cuaca dan fenomena anomali iklim global alih-alih bentuk pelanggaran hukum korporatif dan kegagalan etika antroposentrisme. Kondisi ini sejalan dengan amatan Wibowo dan Santoso (2024) yang menggarisbawahi bahwa jurnalisme bencana di Indonesia kerap mengorbankan ketajaman investigasi tata ruang demi kecepatan sirkulasi berita digital.

Penelitian sebelumnya oleh Wardani (2023) juga menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan di Indonesia mengalami erosi investigasi mendalam, di mana jurnalis online dituntut kecepatan produksi klik (*clickbait*) sehingga mereproduksi narasi siaran pers kelembagaan formal tanpa melakukan verifikasi kritis terhadap dampak sosial-kultural jangka panjang bagi komunitas terdampak. Fenomena ini dipertegas oleh Setiawan dan Darmanto (2023) yang membuktikan bahwa ketergantungan media pada sumber resmi kepolisian dan birokrasi kehutanan menciptakan hegemoni definisi kebencanaan yang steril dari kritik keadilan sosial. Pada dimensi sosiologis, Rahman (2023) memetakan bahwa pemberitaan karhutla di media lokal Sumatera dan Kalimantan sangat minim mengangkat suara perempuan dan kelompok rentan yang menanggung beban domestik ganda akibat kabut asap. Pola keterpinggiran suara lokal ini menunjukkan bahwa ruang redaksi belum menempatkan isu kemanusiaan marjinal sebagai poros moral peliputan bencana.

Kritik terhadap konstruksi agenda media yang antroposentris dan teknokratis juga terus disuarakan oleh para sarjana komunikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Lestari dan Nugroho (2022) mengidentifikasi bahwa relasi kuasa ekonomi politik kepemilikan media sangat membatasi keberanian redaksi dalam mengungkap keterlibatan konglomerasi perkebunan dan kehutanan skala besar, sehingga narasi pemberitaan kerap mengambinghitamkan praktik perladangan tradisional peladang lokal

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

yang sebenarnya telah berakar pada kearifan ekologis turun-temurun. Ketiadaan paradigma etika yang kokoh dalam ruang redaksi dikonfirmasi pula oleh penelitian Ramadhan (2021), yang membuktikan bahwa agenda media nasional memisahkan peristiwa kebakaran hutan dari tanggung jawab moral kolektif dan etika biosfer, memperlakukan alam semata-mata sebagai komoditas fisik dan objek pemuas kebutuhan ekonomi manusia yang dapat digantikan dengan nilai moneter. Sejalan dengan itu, Firmansyah (2021) menggarisbawahi bahwa komodifikasi ruang berita kebencanaan telah menumpulkan sensitivitas moral jurnalis terhadap penderitaan ekologis jangka panjang. Pola peliputan yang seragam ini membentuk pemahaman publik yang terfragmentasi, di mana bencana dipahami sebatas derita teknis musiman yang selesai begitu hujan lebat turun memadamkan api.

Dari pemetaan riset mutakhir lima tahun terakhir tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar dalam literatur komunikasi lingkungan di Indonesia. Sebagian besar penelitian komunikasi media selama ini hampir secara seragam membedah pemberitaan karhutla menggunakan kacamata metodologi Barat yang berpijak pada teori framing kognitif semata (seperti model Robert Entman atau William Gamson) serta analisis kepentingan ekonomi-politik media sekuler. Belum ada upaya akademis yang komprehensif untuk mendekolonisasi kajian komunikasi lingkungan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan filosofis lokal Nusantara sebagai parameter evaluatif kritis atas agenda media. Riset-riset terdahulu cenderung memisahkan antara realitas empiris teks berita dengan dimensi kesadaran transendental dan relasi kosmik, padahal krisis ekologis pada hakikatnya berhulu dari terputusnya relasi etis dan spiritual antara manusia dengan semesta ciptaan.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, yaitu menghadirkan filsafat komunikasi Hindu berbasis ajaran *Tri Hita Karana* sebagai pisau bedah dan kerangka reflektif dalam mengevaluasi dinamika konstruksi agenda media massa daring. *Tri Hita Karana* memuat doktrin relasionalitas holistik yang menegaskan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keberlanjutan hidup kosmis hanya dapat tercapai apabila terpelihara keharmonisan tiga pilar relasi esensial: *Parahyangan* (hubungan harmonis dan etis-spiritual manusia dengan Sang Pencipta/Hukum Kosmis *Rta*), *Pawongan*

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

(hubungan harmonis, berkeadilan, dan empatik antarsesama manusia), serta *Palemahan* (hubungan selaras, welas asih, dan protektif antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya). Sebagaimana diuraikan oleh Sudarsana (2023) serta Wiana (2021), *Tri Hita Karana* bukan sekadar doktrin teologis eksklusif, melainkan sebuah praksis etika universal yang mampu menjembatani krisis relasional modernitas antara masyarakat, alam, dan nilai-nilai ketuhanan. Menjadikan *Tri Hita Karana* sebagai basis epistemologis komunikasi memungkinkan pembacaan teks media melampaui batasan analisis biner untung-rugi materialistis, menuju kritik relasional yang mendalam atas sejauh mana pers menjalankan fungsi profetiknya dalam menjaga tatanan kosmik.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang orientasi jurnalisme lingkungan di era krisis biosfer global. Ketika media massa mengabaikan pilar *Palemahan*, alam terdegradasi menjadi sekadar latar pasif dan statistik luasan lahan yang terbakar tanpa ada pengakuan atas hak-hak inheren biosfer. Ketika pilar *Pawongan* tereduksi, media mengalienasi penderitaan struktural masyarakat adat, anak-anak korban asap, dan ketidakadilan antargenerasi di bawah dominasi suara para elite birokrat dan pemilik modal. Lebih jauh lagi, penafian pilar *Parahyangan* melanggengkan desakralisasi bumi, melahirkan keserakahan (*lobha*) yang memandang alam sebagai ruang eksploitasi nir-batas tanpa adanya pertanggungjawaban etis transendental. Oleh karena itu, pengujian terhadap teks berita karhutla melalui kacamata *Tri Hita Karana* sangat krusial untuk menyadarkan para praktisi media dan akademisi mengenai signifikansi komunikasi profetik yang berpihak pada keberlanjutan semesta.

Berdasarkan latar belakang penulis membahas mengenai Konstruksi Agenda Karhutla Di Media Massa: Refleksi Keharmonisan Relasional Dalam Bingkai Tri Hita Karana. Penelitian ini membahas hal yang mendasar mengenai bagaimana pilar *Palemahan*, *Pawongan*, dan *Parahyangan* direpresentasikan, dimarjinalkan, atau diartikulasikan dalam hierarki isu redaksional ketika krisis kabut asap melanda negeri.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis berbasis teks untuk membongkar lapis makna konstruksi agenda media daring (Kurniawan & Arifin, 2024). Subjek penelitian berfokus pada unit teks

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipublikasikan oleh empat portal berita arus utama nasional terakreditasi dewan pers yakni Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, dan Antaranews.com pada rentang waktu Agustus hingga Oktober saat frekuensi sebaran titik panas (*hotspot*) mencapai puncaknya. Teknik penarikan korpus data dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) dengan menyaring artikel menggunakan kata kunci spesifik kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, dan karhutla, hingga terkumpul total 60 artikel berita terpilih yang memenuhi kriteria keterkaitan isu regulasi, dampak lingkungan, dan konflik sosial. Instrumen pengumpulan data memanfaatkan lembar koding dokumentasi digital yang mencatat struktur mikro dan konteks makro teks berita, yang kemudian dipetakan ke dalam matriks kategorisasi nilai *Tri Hita Karana* yang mencakup dimensi *Palemahan*, *Pawongan*, serta *Parahyangan* (Putra et al., 2023). Analisis data dijalankan melalui tahapan bertingkat yang diadaptasi dari prosedur analisis teks kritis kontemporer (Sari & Ramli, 2022), yang diawali dengan inventarisasi teks, reduksi dan klasifikasi atribut isu agenda media, penafsiran relasional berlandaskan kerangka etika komunikasi Hindu, serta penarikan simpulan eksplanatif. Upaya menjamin keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi teori dengan memadukan konsep agenda setting dan etika ekologi lokal, disertai diskusi terfokus bersama sejawat pakar komunikasi dan kearifan lokal (*peer debriefing*) guna mengeliminasi bias subjektivitas interpretasi selama proses pemaknaan teks berita berlangsung (Utami, 2021).

III. Pembahasan

Hierarki Isu (Agenda Setting) Media Massa dalam Pemberitaan Karhutla

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap korpus 60 teks berita dari media daring nasional (Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, dan Antaranews.com), hierarki isu yang ditetapkan ruang redaksi memperlihatkan pola pembingkaian episodik (*episodic framing*) yang sangat kaku dan terfragmentasi. Media massa secara seragam menempatkan diskursus teknis-operasional penanggulangan bencana pada strata prioritas teratas, di mana lebih dari separuh ruang peliputan dihabiskan untuk merinci

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

aktivitas satgas gabungan, pengerahan armada pesawat pemadam, volume air dalam operasi water bombing, serta distribusi logistik bantuan masker. Kerja penentuan agenda tingkat pertama (*first level agenda setting*) ini beroperasi dengan mengarahkan atensi kognitif publik semata-mata pada dinamika fisik kebakaran yang tengah berkobar di lapangan. Dalam kacamata redaksi, karhutla diperlakukan selayaknya panggung teatrikal musiman yang hanya layak diberitakan ketika asap telah membubung tebal menutupi jarak pandang penerbangan atau saat indeks pencemaran udara menyentuh rekor ekstrem, sehingga menenggelamkan investigasi mendalam mengenai akar penyebab kebakaran yang telah terstruktur selama berbulan-bulan sebelumnya.

Pada lapis penentuan agenda tingkat kedua (*second level agenda setting*), pemilihan atribut isu oleh media daring sangat kental dengan subordinasi ekonomi politik yang bias elite. Narasi pemberitaan secara konsisten membingkai kerugian karhutla dalam metrik ekonomi makro yang terukur secara kuantitatif seperti pembatalan puluhan jadwal penerbangan maskapai komersial, terganggunya rantai pasok ekspor komoditas kelapa sawit dan bubur kertas, serta estimasi kerugian nominal triliunan rupiah yang diderita sektor bisnis dan industri. Sebaliknya, biaya ekologis jangka panjang (*ecological costs*) dan hilangnya modal alamiah yang menopang kehidupan lintas generasi nyaris tidak pernah dikonversi menjadi isu utama. Fenomena ini mengonfirmasi temuan Pratama dan Wijaya (2025), yang mengungkapkan bahwa ruang redaksi media arus utama di Asia Tenggara cenderung mengoperasikan jurnalisme kalkulatif, yakni praktik peliputan yang hanya memvalidasi sebuah krisis lingkungan apabila peristiwa tersebut mengancam sirkulasi modal ekonomi dan stabilitas neraca perdagangan nasional.

Ketergantungan struktural jurnalisme daring terhadap rutinitas peliputan berbasis siaran pers (*press release journalism*) turut memperparah kedangkalan hierarki isu yang terbentuk. Media daring terjebak dalam desakan siklus produksi berita instan (*speed driven journalism*) demi mengejar *traffic* klik pembaca, yang memaksa wartawan di lapangan mengandalkan keterangan seremonial para pembuat kebijakan tanpa melewati tahapan verifikasi kritis dan investigasi yang memadai. Wacana yang beredar di ruang publik pun akhirnya dipenuhi oleh saling silang klaim antarlembaga birokrasi mengenai

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

wilayah mana yang paling cepat memadamkan titik api atau saling melempar tanggung jawab kewenangan tata batas lahan. Sebagaimana disoroti oleh Hidayat et al. (2024), dominasi wacana teknokratis semacam ini telah mengamputasi dimensi kausalitas sistemik dalam jurnalisme lingkungan; karhutla tidak lagi dibaca sebagai manifestasi kegagalan regulasi agraria atau kejahatan korporatif, melainkan disimplifikasi menjadi sekadar insiden teknis lapangan yang dianggap tuntas begitu pejabat terkait selesai memberikan taklimat media dan api berhasil dipadamkan oleh guyuran hujan.

Dampak kumulatif dari hierarki agenda media yang timpang ini adalah terciptanya kesadaran publik semu (*false consciousness*) yang memisahkan peristiwa karhutla dari konteks krisis iklim global. Publik digiring untuk percaya bahwa kebakaran hutan adalah siklus alamiah biasa yang tak terhindarkan setiap kemarau tiba, bukan sebagai alarm darurat biosfer yang memerlukan restrukturisasi kebijakan ekologis secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan kritik tajam Wardani (2023), yang menggarisbawahi bahwa hilangnya liputan investigatif berkelanjutan di ruang redaksi daring telah mengubah jurnalisme lingkungan dari penjaga kepentingan publik dan alam menjadi sekadar pencatat seremonial agenda birokrasi. Upaya menempatkan aspek prosedural penanggulangan di atas pencegahan struktural, media massa sesungguhnya telah melanggengkan siklus kebakaran berulang, karena akar masalah berupa pengeringan kubah gambut dan penguasaan lahan monopolistik tetap luput dari radar pengawasan publik.

Konstruksi Relasi *Tri Hita Karana* dalam Teks Berita

Ketika teks pemberitaan dianalisis menggunakan pisau bedah filosofis *Tri Hita Karana*, terungkap adanya distorsi makna yang mendalam pada dimensi *Palemahan* (harmoni relasional antara manusia dan alam). Teks-teks berita daring secara konsisten memposisikan alam bukan sebagai subjek hidup kosmis yang memiliki hak kedaulatan biologis, melainkan sekadar objek pasif yang dinilai berdasarkan kemanfaatannya bagi eksploitasi manusia. Hutan dan lahan gambut yang terbakar dinarasikan secara mekanistik sebatas kalkulasi angka luasan hektare misalnya terbakarnya 1.200 hektare lahan tidur tanpa menyentuh pemahaman bahwa setiap petak gambut yang musnah

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

merupakan kuburan massal bagi jutaan mikroorganisme pengikat unsur hara, hancurnya koridor satwa liar endemik, serta terlepasnya ratusan megaton karbon purba yang mempercepat pemanasan bumi. Alam diperlakukan sebagai entitas terpisah (*the other*) yang baru dipedulikan ketika hembusan asapnya mengganggu kenyamanan permukiman perkotaan. Kritik Ramadhan (2021) sangat relevan, di mana media terbukti mengidap bias antroposentrisme akut yang mereduksi keutuhan biosfer menjadi sekadar komoditas properti ekonomi, mengabaikan etika biosentrisme yang memandang setiap entitas ciptaan memiliki nilai intrinsik yang wajib dihormati.

Ketimpangan berikutnya termanifestasi pada pilar *Pawongan* (keharmonisan dan keadilan relasi antarsesama manusia), yang ditandai oleh jurang ketidakadilan representasi sumber rujukan berita (*news sourcing*). Proporsi kutipan narasumber dalam teks berita didominasi secara mutlak (lebih dari 70%) oleh suara para elite pemegang otoritas mulai dari menteri, jajaran kepolisian, petinggi militer, hingga asosiasi pengusaha perkebunan sementara masyarakat adat, petani gurem, kelompok perempuan, dan anak-anak yang terkapar di ruang isolasi akibat sesak napas akut nyaris tidak diberikan ruang untuk mengartikulasikan penderitaan mereka secara berdaulat. Bahkan, ketika masyarakat lokal diliput, media kerap memproduksi stereotip stigmatis dengan melabeli mereka sebagai perambah liar atau pelaku pembakaran tradisional, tanpa membedah bahwa masyarakat adat Dayak atau Melayu telah memiliki hukum adat dan sistem bakar sekat bakar ramah gambut yang telah teruji keberlanjutannya selama ratusan tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh Lestari dan Nugroho (2022), hegemoni elite dalam penetapan sumber berita ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang mengubur isu keadilan lingkungan (*environmental justice*); media enggan menyeret nama-nama korporasi raksasa yang secara nyata mengeringkan hidrologi gambut melalui kanal-kanal perkebunan monokultur, dan memilih mengorbankan komunitas lokal yang rentan sebagai kambing hitam demi melanggengkan relasi kuasa ekonomi-politik media.

Dimensi yang mengalami keterasingan paling fatal dalam konstruksi teks berita adalah pilar *Parahyangan*, yakni kesadaran etis spiritual dan kepatuhan moral manusia terhadap tatanan hukum kosmis (*Rta*). Dalam seluruh rangkaian artikel yang diteliti,

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

nyaris tidak ditemukan narasi redaksional yang menyentuh pertobatan ekologis, dosa kosmik, atau panggilan etika spiritual dalam menjaga kelestarian semesta ciptaan. Karhutla dibingkai secara profan dan positivistik, terlepas sama sekali dari pemahaman bahwa perusakan hutan secara masif berakar pada keserakahan batiniah (*lobha*) manusia yang menempatkan akumulasi materi di atas segala-galanya. Media massa tidak pernah menyuarakan bahwa membakar bumi demi ekspansi kapitalisme ekstraktif merupakan bentuk penodaan terhadap kesakralan alam (*sacrilege*) dan pengingkaran terhadap amanah transendental pemeliharaan ciptaan Tuhan. Proses sekularisasi wacana lingkungan yang ekstrem ini mencabut dimensi sakralitas dari hubungan manusia dan mikrokosmos (*bhuana alit*) dengan makrokosmos (*bhuana agung*), sehingga bencana lingkungan hanya dipandang sebagai kegagalan teknologi tanpa menimbulkan rasa bersalah moral di dalam batin masyarakat maupun pengambil kebijakan.

Ketiadaan ketiga pilar *Tri Hita Karana* secara utuh dan seimbang dalam ruang pemberitaan media massa membuktikan bahwa jurnalisme kita tengah mengalami krisis relasionalitas yang parah. Ketika *Palemahan* didistorsi menjadi kalkulasi keuntungan kapitalistik, *Pawongan* dibungkam oleh hegemoni kuasa elite birokrasi, dan *Parahyangan* ditiadakan dari kesadaran moral redaksi, media massa sesungguhnya sedang mereproduksi budaya perusakan itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Wiana (2021) serta Sudarsana (2023), keterputusan ketiga pilar ini secara otomatis meruntuhkan fondasi keharmonisan (*ananda*), menciptakan instabilitas kosmik yang bermanifestasi dalam bentuk bencana ekologis berulang. Teks-teks berita yang diproduksi setiap hari alih-alih menjadi suluh penyadar tatanan kosmis, justru menjadi instrumen legitimasi bagi berlanjutnya eksploitasi alam tanpa henti. Pembacaan kritis berbasis *Tri Hita Karana* ini berhasil membongkar bahwa krisis karhutla di Indonesia bukan sekadar kegagalan operasional pemadaman api di atas tanah gambut, melainkan pantulan dari krisis rohani dan etika peradaban yang dipelihara oleh konstruksi diskursus media yang tercerabut dari akar filosofis keharmonisan hidup Nusantara.

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Implikasi Konstruksi Agenda terhadap Literasi dan Etika Lingkungan Publik

Konstruksi agenda media yang timpang, reduksionis, dan tuna-nilai etika relasional membawa konsekuensi epistemologis dan sosiologis yang sangat destruktif bagi pembentukan literasi ekologis masyarakat luas. Media massa membiasakan khalayak mengonsumsi narasi bencana yang berfokus pada permukaan insiden dan angka kerugian jangka pendek, daya nalar kritis publik terhadap kejahatan lingkungan struktural menjadi tumpul dan pasif. Masyarakat terbiasa memandang kepulan asap pekat sebagai musibah takdir tahunan yang harus diterima dengan kepasrahan, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas udara bersih dan kejahatan ekosida yang menuntut pertanggungjawaban hukum pidana korporasi. Fenomena ini memperkuat telaah Kurniawan dan Arifin (2024), yang menegaskan bahwa framing media yang menonjolkan takdir alamiah dan serbuan cuaca ekstrem berhasil melumpuhkan daya perlawanan masyarakat sipil; kemarahan publik yang seharusnya diarahkan untuk menuntut pencabutan izin konsesi dan audit lingkungan secara total, justru didegradasi menjadi sekadar keluhan keluh-kesah musiman di lini masa media sosial atau antrean pasrah pembagian masker gratis.

Generasi muda yang menyerap informasi tanpa panduan etika lingkungan tradisional cenderung menginternalisasi paradigma materialistik yang memandang alam semata sebagai aset modal yang bebas dikonversi demi dalih pertumbuhan ekonomi atau pembukaan lapangan kerja sesaat. Kearifan luhur peradaban lokal yang memandang pohon, air, dan tanah sebagai entitas bernyawa yang wajib dimuliakan perlahan-lahan terkikis oleh narasi media yang mengagungkan pembangunan fisik teknokratis. Sebagaimana dibuktikan oleh Sari dan Ramli (2022), minimnya kehadiran nilai-nilai kearifan lokal dalam ruang komunikasi termediasi telah mempercepat alienasi (keterasingan) generasi digital dari ruang hidup ekologisnya, melahirkan kelompok masyarakat terdidik yang fasih berbicara mengenai pertumbuhan industri namun buta terhadap kepunahan keanekaragaman hayati dan degradasi tanah air mereka sendiri.

Dalam dimensi etika komunikasi publik, kegagalan media massa menyajikan pilar keharmonisan menuntut adanya dekonstruksi mendasar terhadap etos kerja jurnalisme lingkungan di Indonesia. Menghadapi krisis biosfer yang kian mendekati

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

titik kehancuran (*tipping point*), model jurnalisme konvensional yang bersembunyi di balik tameng objektivitas semu yang sekadar mengutip dua pihak yang bertikai tanpa keberpihakan moral telah terbukti usang dan berbahaya bagi masa depan peradaban. Dibutuhkan lompatan paradigma menuju *relational harmony journalism* (jurnalisme keharmonisan relasional) yang secara berani mengadopsi prinsip etika ekologis *Tri Hita Karana*. Jurnalisme model ini tidak lagi memposisikan diri sebagai pengamat netral di tengah api yang membakar semesta, melainkan mengambil peran advokatif dan profetik yang secara aktif memulihkan martabat alam (*Palemahan*), membela hak hidup dan kedaulatan masyarakat rentan (*Pawongan*), serta menegakkan integritas spiritualitas kosmis (*Parahyangan*) sebagai kompas moral redaksi.

Secara praksis dan transformatif, pergeseran paradigma komunikasi ini menjadi prasyarat mutlak untuk melahirkan gerakan etika lingkungan kolektif yang berkelanjutan. Krisis karhutla tidak akan pernah dapat diatasi secara tuntas hanya dengan memperbanyak armada helikopter pemadam atau memperketat undang-undang yang penerapannya sering kali diskriminatif di meja pengadilan. Menegaskan kesimpulan Utami (2021), keberlanjutan masa depan ekologis bangsa ini sangat bergantung pada keberanian kita untuk memulihkan kembali kesadaran batiniah bahwa merusak alam sama artinya dengan menghancurkan diri manusia itu sendiri dan mengkhianati amanah Sang Pencipta. Upaya mentransformasi agenda media dari sekadar pencatat bencana menjadi agen pembangun keharmonisan relasional berbasis kearifan lokal Nusantara, pers nasional dapat mengembalikan fungsi sejatinya sebagai penjaga moral peradaban, pengawal keadilan sosial, dan benteng penyelamat keutuhan alam semesta.

IV. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hierarki penentuan agenda (*agenda setting*) media massa daring dalam meliput kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih dalam bingkai episodik yang mengutamakan seremoni birokrasi dan dampak ekonomi jangka pendek, dengan mengabaikan akar persoalan tata kelola ekologis. Melalui refleksi kritis *Tri Hita Karana*, ditemukan adanya ketimpangan relasional yang mendalam pada pilar

Palemahan terdistorsi akibat pereduksian alam menjadi komoditas pasif, pilar *Pawongan* tercederai oleh marjinalisasi suara kelompok adat dan masyarakat rentan demi hegemoni elite kekuasaan, serta pilar *Parahyangan* nyaris sepenuhnya absen akibat sekularisasi wacana yang meniadakan tanggung jawab moral dan kesadaran spiritual kosmis. Kegagalan konstruksi agenda ini berimplikasi langsung pada mendangkalnya literasi ekologis publik yang menormalisasi bencana musiman dan mematikan daya kritis masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

Anggraini, D., & Hidayati, N. (2023). Komunikasi bencana dan konstruksi realitas kabut asap di media siber Indonesia. Jurnal Riset Komunikasi, 6(1), 45–59.

Astuti, P., & Prasetyo, K. (2022). Dekonstruksi wacana lingkungan hidup dalam jurnalisme advokasi di Indonesia. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 7(2), 178–190.

Dewi, N. K., & Wibawa, I. M. (2023). Implementasi nilai-nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* dalam mitigasi krisis ekologis era modern. Jurnal Filsafat Indonesia, 6(2), 112–124.

Fauzi, A., & Susilo, D. (2024). Framing media daring terhadap konflik agraria dan kebakaran lahan gambut di Kalimantan. Komunikator, 16(1), 33–47.

Firmansyah, A. (2021). Komodifikasi ruang berita dan marginalisasi isu lingkungan dalam jurnalisme kontemporer. Jurnal Kajian Media, 5(2), 141–155.

Gunawan, I. W., & Suadnyana, I. B. (2022). Etika komunikasi Hindu: Membangun harmoni sosial dan spiritualitas kosmis. Jurnal Dharmasmrti, 22(1), 55–68.

Hidayat, R., Nugraha, A., & Puspitasari, L. (2024). Representasi krisis iklim dan atribusi kausalitas pada portal berita daring nasional. Jurnal Komunikasi Indonesia, 13(1), 77–92.

Indrawan, M., & Kusuma, B. (2023). Ekologi politik media: Kepemilikan industri pers dan bias peliputan karhutla di Sumatera. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(3), 289–304.

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Kurniawan, B., & Arifin, Z. (2024). Analisis wacana kritis teks berita kebakaran hutan dan implikasinya terhadap literasi ekologis publik. Jurnal Aspikom, 9(2), 210–226.

Lestari, S., & Nugroho, C. (2022). Relasi kuasa ekonomi politik dalam pembingkaian kebakaran hutan di media arus utama. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 20(2), 125–139.

Mahendra, G. (2025). Jurnalisme restoratif dan akuntabilitas hukum korporasi dalam bencana kebakaran lahan. Jurnal Kajian Jurnalisme, 8(2), 101–116.

Pratama, A. R., & Wijaya, H. (2025). Agenda setting media daring Asia Tenggara terhadap kebakaran lahan gambut: Menilai dominasi suara teknokratik. Jurnal Wacana Komunikasi, 11(1), 15–31.

Purnomo, E. P., & Ramdani, R. (2021). Tata kelola kolaboratif dan hambatan komunikasi antarlembaga dalam penanganan kebakaran hutan di Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(1), 60–74.

Putra, I. G. A., Sudarma, I. M., & Arimbawa, I. W. (2023). Konstruksi nilai *Tri Hita Karana* dalam diskursus komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu, 5(1), 40–54.

Rahman, M. T. (2023). Marginalisasi suara perempuan dan kelompok rentan dalam liputan kabut asap di media regional. Jurnal Studi Gender dan Komunikasi, 4(1), 18–32.

Ramadhan, F. (2021). Bias antroposentrisme dan komodifikasi alam dalam liputan kebakaran hutan media daring. Jurnal Komunikasi Lingkungan Indonesia, 3(2), 88–103.

Santoso, B., & Wulandari, S. (2022). Jurnalisme lingkungan di era kecepatan digital: Dilema akurasi dan sensasionalisme. Jurnal Dewan Pers, 24(1), 65–79.

Sari, R. P., & Ramli, M. (2022). Erosi kearifan ekologis generasi digital: Refleksi kritis atas konsumsi media kebencanaan. Jurnal Komunikasi Kontemporer, 14(2), 143–158.

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Setiawan, D., & Darmanto, S. (2023). Hegemoni sumber berita resmi dan pembungkaman suara masyarakat adat dalam isu perladangan. Media & Society Review, 5(1), 90–106.

Sudarsana, I. K. (2023). Teologi komunikasi Hindu dan harmoni kosmis: Merajut kembali kesadaran batiniah manusia modern. Jurnal Yoga dan Kesehatan, 6(1), 1–15.

Suryawan, I. N., & Mahadewi, N. M. (2024). Filosofi *Tri Hita Karana* sebagai paradigma dekolonisasi teori komunikasi lingkungan di Indonesia. Jurnal Filsafat dan Kebudayaan, 10(2), 180–195.

Utami, L. S. S. (2021). Triangulasi metodologi dan validitas kualitatif dalam penelitian komunikasi berbasis kearifan lokal. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 5(2), 345–354.

Wardani, K. A. (2023). Clickbait dan erosi jurnalisme investigatif lingkungan di ruang redaksi daring Indonesia. Jurnal Komunikasi Massa, 15(3), 201–217.

Wiana, I. K. (2021). Makna *Tri Hita Karana* dalam menjaga keseimbangan jagat raya di era antroposen. Jurnal Kebudayaan Hindu, 19(2), 85–97.

Wibowo, A., & Santoso, H. (2024). Evaluasi peliputan bencana kabut asap lintas batas: Tinjauan etika jurnalisme damai dan lingkungan. Jurnal Interaksi Komunikasi, 13(1), 110–126.